

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tinjauan Teori

Dalam tinjauan teori, terdapat beberapa teori yang digunakan peneliti sebagai acuan pada penelitian ini, diantaranya :

1.1.1. Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Badan Penanggulangan Bencana Nasional, 2011)

Bencana terbagi menjadi 3 jenis bencana yaitu :

1. Bencana Alam

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

2. Bencana Non Alam

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang diantara lain berupa kegagalan teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.

3. Bencana Sosial

Bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan manusia yang meliputi konflik social antar kelompok dan antar komunitas masyarakat serta terror.

Berdasarkan teori diatas bencana kebakaran merupakan jenis bencana Non Alam. Karena kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah atau permukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan kerugian.

1.1.2. Kebakaran

Terjadinya api yang tidak dikehendaki, tidak terkendali dan merugikan dapat didefinisikan sebagai kebakaran. Dari adanya definisi tersebut, maka terjadinya kebakaran tidaklah selalu identik dengan munculnya suatu api yang besar. Kebakaran juga dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa munculnya suatu api oleh proses kimia yang menimbulkan kerugian baik berupa harta benda ataupun cedera yang berujung kematian. (Rijanto, B.boedi dalam Hangga Andriyanto, 2013). Menurut (Badan Penanggulangan Bencana Nasional, 2017) Kebakaran juga dapat diartikan sebagai proses perusakan suatu benda oleh api. Didaerah perkotaan yang penuh perumahan penduduk, kebakaran sering terjadi dan dapat meluas dari satu rumah kerumah yang lain. Jika tidak diantisipasi, maka kebakaran dapat menimbulkan bencana atau kerugian harta benda bahkan jiwa.

Sifat dari kebakaran adalah cepat menyebar, panas, menghasilkan asap yang gelap dan mematikan dikarenakan berasal dari api. Ada 4 unsur utama pemicu awal terjadinya kebakaran, yaitu adanya oksigen, adanya bahan

bakar/bahan-bahan mudah terbakar, adanya reaksi kimia atau keadaan panas yang melampaui titik suhu kebakaran. Dalam konsep dan pendekatan dalam penyusunan rencana induk proteksi kebakaran untuk kabupaten/kota di Indonesia (Prof. Dr. Ir. Suprpto, 2013) ada 7 faktor pemicu terjadinya kebakaran diantaranya :

1. Frekuensi Kebakaran

Frekuensi Kebakaran merupakan suatu fenomena atau kejadian kebakaran yang terdapat pada suatu wilayah berupa penambahan atau peningkatan intensitas kejadian. Kejadian kebakaran yang terjadi pada suatu wilayah akan dapat dilihat kecenderungan akan kejadian kebakaran yang terjadi berdasarkan frekuensi kebakaran. Berdasarkan indeks rawan bencana Indonesia, frekuensi kebakaran dapat dikatakan sebagai kejadian yang dikatakan rendah, sedang maupun tinggi berdasarkan pembagian kelasnya. Klasifikasi kebakaran dalam 3 kelas yaitu rendah (<2%), sedang (2-5%) dan tinggi (>5%) (Badang Penanggulangan Bencana Nasional, 2012)

2. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan faktor kedua dimana setiap adanya penggunaan lahan memiliki tingkat atau dapat menimbulkan adanya suatu bahaya terjadinya bencana kebakaran. Hal seperti ini terjadi dikarenakan setiap penggunaan lahan memiliki angka klasifikasi terhadap potensi resiko kebakaran yang ditimbulkan. Klasifikasi daerah resiko kebakaran berdasarkan penggunaan lahan daerah rawan kebakaran dapat dikenali menurut penggunaan lahan bangunannya diantara lain :

a. Kawasan Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Menteri No.20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, Kawasan perdagangan merupakan penggunaan lahan dengan resiko kebakaran tinggi karena termasuk hunian dengan fungsi sebagai perdagangan bisa berupa pertokoan dan pasar.

b. Kawasan Jasa

Berdasarkan Peraturan Menteri No.20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, Kawasan jasa memiliki resiko kebakaran sedang dikarenakan dalam penggunaan lahan jenis ini memiliki kuantitas atau bahan mudah terbakar sedang yang meliputi warung makan, bengkel dan pergudangan.

c. Kawasan Perkantoran

Berdasarkan Peraturan Menteri No.20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, kawasan perkantoran memiliki resiko kebakaran rendah, karena penggunaan lahan mirip untuk permukiman yang diperuntukkan untuk kegiatan kantor, seperti pemerintahan dan lain sebagainya.

d. Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Menteri No.20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, kawasan permukiman diperuntukkan untuk kegiatan bermukim/tempat tinggal beserta kelengkapan sarana dan prasarana. Hal ini berarti penggunaan

lahan kawasan permukiman memiliki resiko kebakaran relatif rendah dimana penggunaan lahan jenis ini bisa merupakan permukiman, kesehatan, pendidikan dan peribadatan

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk pada suatu wilayah memiliki kerentanan kebakaran dan resiko dampak kebakaran. Semakin tinggi kepadatan penduduk dalam suatu wilayah maka akan membawa potensi terjadinya kebakaran pada suatu wilayah, sebaliknya semakin rendah kepadatan penduduk suatu wilayah maka akan semakin rendah pula potensi kebakaran terjadi. Adapun klasifikasi kepadatan penduduk berdasarkan Perka BNPB No.2 Tahun 2012 diantaranya :

- a. Klasifikasi Penduduk Rendah : <math><500 \text{ Jiwa/Km}^2</math>
- b. Klasifikasi Penduduk Sedang : 500-1000 Jiwa/Km²
- c. Klasifikasi Penduduk Tinggi : >1000 Jiwa/Km²

4. Kepadatan Bangunan

Kepadatan bangunan merupakan faktor pemicu terjadinya kebakaran dikarenakan resiko kebakaran yang ditimbulkannya. Hal ini dikarenakan dalam suatu wilayah yang memiliki kepadatan bangunan yang tinggi atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang tinggi, maka kejadian kebakaran akan lebih cepat menyebar karena kondisi akan kepadatan bangunan yang tinggi yang berdampak semakin meluasnya wilayah yang terkena dampak. Perhitungan kepadatan bangunan dalam penelitian ini berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 36, 2005) Tentang (Undang Undang Nomor 28, 2002) diantaranya:

- a. KDB tingkatan rendah : <30%
- b. KDB tingkatan sedang : 30% - 60%
- c. KDB tingkatan tinggi : >60%

5. Proteksi Terpasang

Proteksi terpasang merupakan suatu usaha atau potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah didalam upaya mencegah terjadinya suatu bencana kebakaran. Dalam hal ini bisa berupa sarana atau prasarana kebakaran dimana dapat melihat proteksi yang terpasang pada suatu wilayah dalam mencegah terjadinya kebakaran. Sarana dan prasarana meliputi :

a. Fire Hydran

Menurut NFPA, jangkauan pelayanan hydran yaitu 152 meter dengan sumber air dari alam seperti kolam air, danau, sungai, jeram, sumur dan saluran irigasi. Selain itu juga dapat dari sumber air buatan seperti tangki air, tangki gravitasi, kolam renang, air mancur, reservoir, mobil tangki dan fire hydrant.

b. Pos Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Permen PU No.20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, jangkauan pelayanan setiap pos pemadam kebakaran dengan radius maksimal 2,5 km.

c. Jalur Evakuasi

Wilayah yang didalamnya terdapat jalur evakuasi dapat dikatakan sebagai wilayah yang memiliki proteksi terhadap bencana atau dapat

dikatakan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh wilayah tersebut dalam mengurangi resiko bencana yang terjadi, begitu juga sebaliknya, sehingga ketiadaan jalur evakuasi akan menjadi pemicu kebakaran dan resiko kebakaran yang lebih besar. Dalam RTRW Kota Banjarmasin Tahun 2013 terdapat jalur evakuasi tetapi hanya secara umum saja.

6. Kesiapan Masyarakat

Kesiapan masyarakat adalah bagaimana suatu masyarakat pada suatu wilayah didalam upaya mencegah terjadinya kebakaran, mengatasi terjadinya kebakaran, serta tanggap terhadap situasi kebakaran. Berdasarkan UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Kesiapan masyarakat dapat dilihat dari keberadaan SATLAKAR serta upaya pencegahan dari adanya program pencegahan kebakaran yang ada dalam suatu wilayah, dalam upaya menciptakan kemampuan dari adanya suatu pelatihan akan tanggap bencana.

7. Aksesibilitas

Setiap lingkungan bangunan gedung dan bangunan gedung dalam perkotaan harus menyediakan aksesibilitas untuk keperluan pemadam kebakaran yang meliputi jalur masuk termasuk putaran balik bagi aparat pemadam kebakaran, dan akses masuk ke dalam bangunan gedung untuk dipergunakan pada saat kejadian kebakaran dan Otoritas berwenang setempat menentukan dan membuat jalur masuk aparat pemadam kebakaran ke lokasi sumber air termasuk perkerasan jalan, belokan, jalan penghubung, jembatan, pada berbagai kondisi alam sesuai dengan ketentuan standar konstruksi yang berlaku.

1.1.3. Rawan Kebakaran

Suatu kerawanan pada suatu wilayah dapat dilihat dari tinggi atau rendahnya suatu bencana. Adanya kemampuan wilayah dalam menghadapi resiko bencana akan diuji oleh adanya ancaman dan kerentanan bencana. Semakin besar suatu ancaman dan kerentanan wilayah terhadap suatu bencana tanpa diimbangi oleh kemampuan wilayah dalam menghadapi bencana pada wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya (Andriyanto, 2013)

Undang-undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana mengartikan rawan bencana adalah suatu kondisi atau keadaan atau karakteristik pada suatu wilayah baik berupa keadaan geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, dsb yang dalam jangka waktu tertentu dapat mengurangi kemampuan wilayah dalam menghadapi bahaya atau dampak buruk tertentu.

Dalam konteks kebakaran, resiko diartikan sebagai suatu kecenderungan akan terjadinya kebakaran dari adanya konsekuensi atas potensi yang ditimbulkan dimana merupakan pemicu atas penyebab terjadinya kebakaran. Sehingga kecenderungan ini diartikan sebagai potensi terjadinya kebakaran atau kerawanan bencana.

1.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Kebakaran

Masalah kebakaran di lingkungan permukiman dan perumahan sangat kompleks. Penyebabnya instalasi beragam karena menyangkut masyarakat umum yang berjumlah jutaan diberbagai wilayah di Indonesia. Penyebab kebakaran permukiman diantaranya adalah :

a. Instalasi Listrik

Kebakaran yang sering terjadi di permukiman disebabkan oleh instalasi listrik karena pemasangan instalasi yang tidak sempurna, penggunaan alat atau instalasi yang tidak standar atau kurang aman, penggunaan listrik dengan cara tidak aman, serta penggunaan peralatan yang tidak baik atau rusak.

b. Peralatan Memasak

Penyebab kebakaran yang potensial di lingkungan rumah adalah dari alat masak, baik gas, kompor minyak tanah maupun listrik. Banyak pengguna gas LPG yang kurang paham cara penggunaan gas yang aman.

c. Perilaku Penghuni

Kebakaran di permukiman juga sering terjadi karena perilaku penghuni, misalnya menyalakan api untuk penerangan ditempat penyimpanan bahan bakar (bensin) yang mudah terbakar, menempatkan obat nyamuk, lilin, lampu teplok yang sedang menyala ditempat yang mudah terbakar, atau menggunakan peralatan listrik berlebihan melampaui beban yang aman (Yunita Adilla; Sidharta Adyatma; Deasy Arisanty, 2016)

Selain itu, menurut (Hebbie Ilma Adzim) faktor –faktor penyebab terjadinya kebakaran diantaranya ialah :

a. Faktor terjadinya kebakaran karena alam :

- Petir (misal : sambaran petir pada bahan mudah terbakar)
- Gempa bumi (misal : gempa bumi yang mengakibatkan terputusnya jalur gas bahan bakar)

- Gunung meletus (dikarenakan lava pijar yang panas membakar tumbuhan kering disekitarnya)
 - Panas matahari (misal : panas matahari yang memantul dari kaca cembung ke dedaunan kering disekitarnya)
- b. Faktor terjadinya kebakaran karena manusia :
- Disengaja (pembalakan liar, balas dendam, dll)
 - Kelalaian (lupa mematikan tungku pembakaran saat akan meninggalkan rumah, dll)
 - Kurang pengertian (membuang rokok sembarangan, merokok di dekat tempat pengisian bahan bakar, dll)
- c. Faktor penyebab kebakaran karena binatang : tikus, kucing dan binatang peliharaan lainnya yang berpotensi menimbulkan kebakaran akibat terdapat sumber api di sekitar rumah tanpa pengawasan dan lain-lain.

Prof. Dr. Ir. Suprpto, MSc. FPE. IPM dalam konsep dan pendekatan dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran untuk Kabupaten/Kota di Indonesia, ada beberapa faktor penyebab kebakaran yaitu pemicu kebakaran yang meliputi pertumbuhan kebakaran, Penggunaan Lahan, Kepadatan Penduduk, Kepadatan Bangunan, Proteksi Terpasang serta Kesiapan Masyarakat. Selain pemicu kebakaran, faktor penyebab kebakaran yaitu resiko kebakaran yang diartikan sebagai suatu kecenderungan akan terjadinya kebakaran dari adanya konsekuensi atas potensi yang ditimbulkan dimana merupakan pemicu atas penyebab terjadinya kebakaran, sehingga

kecenderungan ini diartikan sebagai potensi terjadinya kebakaran atau kerawanan bencana.

1.2. Tinjauan Kebijakan

Dalam tinjauan kebijakan, terdapat beberapa kebijakan yang digunakan peneliti sebagai acuan pada penelitian ini, diantaranya :

1.2.1. Undang – Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

(Undang Undang Nomor 24, 2007) Tentang Penanggulangan Bencana telah menjabarkan tentang tujuan, tanggung jawab serta wewenang pemerintah terkait, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1 UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Tujuan	Tanggung Jawab	Wewenang
1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana	1. Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan	1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional
2. Menyeleraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada	2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana	2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan		

Tujuan	Tanggung Jawab	Wewenang
menyeluruh		penanggulangan bencana 3. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah

Sumber : Undang-undang No.24 Tahun 2007

Berdasarkan tujuan, tanggung jawab serta wewenang yang terdapat di UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sudah mengatakan bahwa Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, yang artinya harus dilakukan pembuatan/penetapan dokumen terkait bencana termasuk bencana kebakaran seperti dokumen RISPK ataupun dokumen-dokumen terkait didaerah daerah di Kota Banjarmasin khususnya Kecamatan Banjarmasin Tengah untuk mengurangi resiko terjadinya bencana kebakaran.

2.2.2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan

Perkembangan penyelenggaraan bangunan gedung di perkotaan dewasa ini semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, maupun kebutuhan prasarana dan sarananya. keselamatan masyarakat yang berada di dalam bangunan gedung dan lingkungannya harus menjadi pertimbangan utama khususnya terhadap bahaya kebakaran, agar manusia dapat melakukan kegiatannya, dan meningkatkan produktivitas serta kualitas hidupnya. Manajemen proteksi kebakaran di perkotaan dimaksudkan untuk mewujudkan bangunan gedung,

lingkungan, dan kota yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan manajemen proteksi bahaya kebakaran yang efektif dan efisien. Selain itu manajemen proteksi kebakaran diperkotaan juga bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesigapan, dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung, serta dinas terkait dalam mencegah, dan menanggulangi bahaya kebakaran.

Manajemen proteksi kebakaran diperkotaan terbagi menjadi 3 yaitu proteksi kebakaran di kota, proteksi kebakaran di lingkungan termasuk ketentuan mengenai sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) dan proteksi kebakaran di bangunan gedung termasuk panduan penyusunan model Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK/Fire Emergency Plan) pada Bangunan Gedung, serta pembinaan dan pengendaliannya. Dalam dokumen ini juga terdapat prasarana dan sarana proteksi kebakaran, yang meliputi :

1. Prasarana Proteksi Kebakaran

Prasarana proteksi kebakaran terdiri dari :

- a. Pasokan air untuk pemadam kebakaran

Pasokan air untuk keperluan pemadam kebakaran diperoleh dari sumber alam seperti kolam air, danau, sungai, jeram, sumur dalam dan saluran irigasi maupun buatan seperti tangki air, tangki gravitasi, kolam renang, air mancur, reservoir, mobil tangki air dan hidran. Dalam hal pasokan tersebut berasal dari sumber alami maka harus dilengkapi dengan pemipaan/peralatan penghisap air (drafting point). Peletakan hidran ini harus berukuran tinggi sedikitnya 75 mm dan lebar 12,5 mm.

- b. Instansi pemadam kebakaran setempat wajib menyediakan bahan pemadam bukan air sebagai berikut

Bahan pemadam bukan air dapat berupa foam atau bahan kimia lain dan penggunaan bahan pemadam bukan air harus disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan potensi bahaya kebakaran dan harus memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku termasuk aman terhadap lingkungan.

- c. Aksesibilitas

Setiap lingkungan bangunan gedung dan bangunan gedung dalam perkotaan harus menyediakan aksesibilitas untuk keperluan pemadam kebakaran yang meliputi jalur masuk termasuk putaran balik bagi aparat pemadam kebakaran, dan akses masuk ke dalam bangunan gedung untuk dipergunakan pada saat kejadian kebakaran dan Otoritas berwenang setempat menentukan dan membuat jalur masuk aparat pemadam kebakaran ke lokasi sumber air termasuk perkerasan jalan, belokan, jalan penghubung, jembatan, pada berbagai kondisi alam sesuai dengan ketentuan standar konstruksi yang berlaku.

2.2.3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032

diantara muatannya yaitu berisi Rencana Struktur Ruang yang meliputi :

1. Sistem Pusat – Pusat Pelayanan Kota

Tabel 2 Sistem Pusat – Pusat Pelayanan Kegiatan Kota

No	Sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota	Keterangan
1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Pusat Pelayanan Kota sebagai pusat pertumbuhan utama dan pusat kegiatan wilayah perkotaan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dan menjadi pusat perdagangan dan jasa regional.
2	Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Lokasi Pusat Pelayanan Kota (PPK) terdapat di Kelurahan Kertak Baru Ulu.
3	Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK)	Lokasi Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK) terdapat di Kelurahan Kuin Utara, Kelurahan Kuripan, Kelurahan Tanjung Pagar, Kelurahan Teluk Dalam dan Kelurahan Kuin Cerucuk.
4	Pusat Lingkungan (PK)	Lokasi pusat-pusat lingkungan (PL) terdapat di Kelurahan Alalak Utara, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kelurahan Sungai Jingah, Kelurahan Bana Anyar, Kelurahan Pemurus Luar, Kelurahan Pemurus Dalam, Kelurahan Kelayan Timur, Kelurahan Kelayan Selatan, Kelurahan Basirih, Kelurahan Teluk Dalam dan Kelurahan Alalak Selatan.
5	Kawasan-kawasan yang berfungsi	a. Kawasan Pusat Pelayanan Kota

No	Sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota	Keterangan
	sebagai pusat pelayanan kota (PPK) dan sub pusat pelayanan kota (SPK) perlu ditindak lanjuti dengan penyesuaian RDTRK meliputi:	<p>(PPK) adalah RDTRK Kecamatan Banjarmasin Tengah</p> <p>b. Kawasan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK) terdiri atas RDTRK Kecamatan Banjarmasin Barat, RDTRK Kecamatan Banjarmasin Timur, RDTRK Kecamatan Banjarmasin Utara dan RDTRK Kecamatan Banjarmasin Selatan.</p>

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin,2012-2032

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Banjarmasin Tengah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2012-2032 di Rencana Struktur Ruang merupakan Pusat Pelayanan Kota, yang artinya Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagai wadah kegiatan – kegiatan kota dengan segala aktivitasnya menjadikan banyak lahan terbangun dan terjadinya kepadatan bangunan serta penduduk yang relatif tinggi. Maka dari itu, pentingnya melakukan penelitian ini untuk meminimalisir kejadian kebakaran di pusat pelayanan kota di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini.

2. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota

Tabel 3 Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota

No	Sistem Jaringan Prasarana Wlayah Kota	Keterangan
1	Sistem penyediaan air minum	rencana sistem sambungan kran/hidran umum melayani seluruh kawasan perkotaan dan pengelolaannya dapat

dilakukan oleh suatu badan usaha atau diserahkan kepada masyarakat dengan membentuk kelompok pemakai air

2 Sistem Drainase Kota

- a. Sistem drainase primer, meliputi Sungai Sugaling, Sungai Kuin, Sungai Duyung, Sungai Anjir Mulawarman, Sungai Teluk Dalam, Sungai Pelambuan, Sungai Perigi, Sungai Kuin Kecil, Sungai Pandai, Sungai Jeruju, Sungai Banyuur Utara, Sungai Tapis Kandal Sungai Sakaban Pasai, Saka Pelangi, Saka Dingin, Sungai Awang, Sungai Halinau, Saka Harang, Saka Mangkuk, Saka Bangun, Antasan Bondan, Sungai Basirih, Sungai Panggal, Sungai Banyuur, Sungai Antasan Raden, Sungai Buaya, Sungai Bahaur, Sungai Bagau, Sungai Laksana Intan, Sungai Gg. Sa'adah, Sungai Belasung, Sungai Pasar Rambai, Sungai Tatas, Sungai Kelayan, Sungai Pekapuran, Sungai Benawa, Sungai Sifa, Sungai Parit, Sungai Juragan Kusin, Sungai Surgi Mufti, Sungai Pecinan/Veteran, Sungai Bilu, Sungai Keramat, Sungai Jingah, Sungai Pengambangan, Sungai Darapan, Sungai Gampa, Sungai Lulut
 - b. sistem drainase sekunder, meliputi Sungai Jagad Raya, Sungai Pangeran,
-

Sungai Miai, Sungai Kidaung, Sungai Saka Permai, Sungai Batas Belitung Darat, Sungai Landas, Sungai Cenderawasih, Sungai Kerukan, Sungai Skip Lama, Sungai Pasar Kamboja, Sungai Gg. Melati, Sungai Sidomulyo, Sungai Airmantan, Anak Sungai Pelambuhan Kanan, Anak Sungai Pelambuhan Kiri, Sungai Bayam, Sungai Andai, Anak Sungai Pangeran Ki 1, Anak Sungai Pangeran Ki 2, Sungai Simpang Tangga, Sungai Tungku, Anak Sungai Miai, Anak Sungai Kidaung, Sungai Jalan Bali, Saka Mangkuk Kiri, Saka Tallan, Sungai Simpang Jelai, Sungai Runggun, Handil Bamban, Handil Bujur, Handil Bujur Kiri, Anak Sungai Banyuur, Sungai Bagau Kanan, Sungai Bagau Kiri, Anak Sungai Gg. Sa'adah, Sungai Telawang, Sungai Kelayan Kecil, Sungai Pemurus, Antasan Segara, Sungai Guring, Sungai Kuripan, Sungai Manggis, Sungai Lumbah, Sungai Gatot, Sungai Gardu, Sungai Simpang Layang, Sungai Simpang Limau, Sungai Simpang Bamban, Sungai Meratus, Sungai Simpang Jelai Kiri, Sungai Tatah Bangkal, Sungai Peradaban, Sungai Tatah

-
- Belayung, Sungai Gudang, Sungai Ahmad Yani, Handil Jatuh, dan saluran drainase jalan raya yang berada di setiap jalan arteri
- c. sistem drainase tersier berada di lingkungan perumahan.
- 3 Jalur Evakuasi Bencana Jalur evakuasi bencana kebakaran memanfaatkan jaringan jalan meliputi Jalan Perdagangan, Jalan P.M Noor, Jalan Sutoyo S., *Banjarmasin Inner Ringroad*, Jalan Pramuka menuju RTH publik di kawasan tersebut.
-

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin,2012-2032

Dalam penelitian ini sangat penting mengetahui sistem jaringan prasarana kota untuk mengetahui apakah pemerintah Kota Banjarmasin siap dengan segala kemungkinan kejadian kebakaran yang akan terjadi. Pada sistem penyediaan air minum disebutkan bahwa rencana sambungan kran/hidran akan dilakukan diseluruh kawasan perkotaan, maka dalam penelitian ini akan dilakukan observasi untuk mengetahui apakah sudah terimplementasi atau masih rencana yang terdapat pada dokumen RTRW. Selain itu juga akan di lakukan observasi pada sistem drainase kota serta jalur evakuasi bencana berdasarkan RTRW Kota Banjarmasin Tahun 2012-2032.

2.3. Penelitian Terdahulu

Berikut Tabel 4 adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi salah satu acuan peneliti dalam menjawab rumusan masalah agar mencapai sasaran penelitian. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu menggabungkan beberapa teori dan metode yang dipakai di beberapa penelitian terdahulu untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam.

Tabel 4 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hangga Andriyanto 2013, Pemetaan Potensi dan Resiko Kebakaran di Kota Surakarta (Tugas Akhir)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui sebaran wilayah berpotensi kebakaran di Kota Surakarta 2. Untuk memberikan rekomendasi pencegahan dan penanggulangan terhadap 	Menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif berdasarkan pada makna penalaran atas definisi terhadap suatu situasi dalam konteks ruang lingkup penelitian pada pendekatan kualitatif, sedangkan pada kuantitatif dengan menggunakan data angka/numerik sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan berupa nilai output yang terangkum dalam gambaran wilayah	Frekuensi Kejadian, Penggunaan Lahan, Kepadatan Penduduk, Kepadatan Bangunan, Proteksi Terpasang dan Kesiapan Masyarakat	Dihasilkannya pemetaan wilayah potensi kebakaran dan faktor pemicu terjadi kebakaran

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		bencana kebakaran di Kota Surakarta			
2	Asep Yudi Permana, Indah Susanti, Karto Wijaya 2019, Kerentanan Bahaya Kebakaran Di Kawasan Kampung Kota (Kasus : Kawasan Balubur Tamansari Kota Bandung)	Untuk mengidentifikasi kerentanan kebakaran di daerah Balubur Tamansari Kota Bandung	Penelitian ini menggunakan pendekatan spasial dan analisis risiko bencana serta analisis deskriptif	Kepadatan Penduduk, Kualitas Bangunan, Kepadatan Bangunan dan Kerapatan Jaringan Jalan	Diketuinya tingkat risiko kebakaran
3	Yunita Adilla, Sidharta Adyatma,	Untuk mengetahui faktor penyebab	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode	Pemasangan Instalasi Listrik, Penggunaan	Diketuinya faktor penyebab kerentanan

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Deasy Arisanty 2016, Faktor Penyebab Kerentanan Kebakaran Berdasarkan Persepsi Masyarakat di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Banjarmasin	kerentanan kebakaran berdasarkan persepsi masyarakat di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	Deskriptif Kuantitatif	Peralatan Memasak, Penggunaan Alat Penerangan Saat Listrik Padam, Penggunaan Obat Nyamuk Bakar, Jarak Antar Rumah, dan Jenis Bangunan.	dan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pemasangan instalasi listrik yang aman
4	Dinimiar Fitrah Saraswati dan Agung Budi Cahyono 2017, Analisis Derah	Untuk mengetahui daerah risiko bencana kebakaran di Kota Surabaya	Metode penelitian ini menggunakan analisis spasial dengan metode skoring dan pembobotan	Penggunaan Lahan, Kepadatan Penduduk, Kepadatan Bangunan, Kejadian	Diketahuinya kecamatan dengan risiko tinggi dan tingkat risiko tinggi di kawasan lahan

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Risiko Bencana Kebakaran Di Kota Surabaya Menggunakan Sistem Informasi Geografis.			Kebakaran, Lokasi Pos Pemadam Kebakaran, Waktu Tanggap Bencana Kebakaran dan Lokasi Sumber Potensi Air	terbangun
5	Firdha Amalia, Sri Utami, Heru Sufianto 2017, Konsep Permukiman Tanggap Kebakaran Di Banjarmasin (Studi Kasus : Kelurahan Kelayan Tengah)	Untuk mendapatkan konsep permukiman tanggap kebakaran di Kelurahan Kelayan Tengah yang dapat menjadi masukan untuk penataan	Metode penelitian ini menggunakan metode analisis campuran pada data kondisi fisik eksisting dengan mempertimbangkan kondisi non fisik (sosial dan budaya).	Kepadatan Bangunan, Kondisi Jalan dan Sarana Prasarana Lingkungan	Dihasilkannya konsep desain permukiman tanggap kebakaran di Kelayan Tengah mengangkat permasalahan tingginya frekuensi kebakaran permukiman di Kota Banjarmasin, salah

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		permukiman di Banjarmasin.			satunya Kelurahan Kelayan Tengah

Sumber : Hasil Olah Data, 2020